GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Media Indonesia
Tgl/Bln/Thn : 24 Juni 2008
Subjek : Limbah
Halaman : 12

COP 9 KONVENSI BASEL

# Setiap Negara Wajib Mengolah Limbah

**NUSA DUA (MI):** Wilayah Indonesia sangat rentan terhadap pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Meskipun demikian, Indonesia mendukung penuh upaya pengolahan limbah B3 di setiap negara.

Pernyataan itu disampaikan Presiden Pertemuan para Pihak IX (COP-9) Konvensi Basel Rachmat Witoelar di Nusa Dua, Bali, kemarin.

Pernyataan itu disampaikan seusai membuka COP-9 Konvensi Basel yang dihadiri seribu peserta dari 170 negara yang telah meratifikasi Konvensi Basel.

Menurut Rachmat yang juga Menteri Lingkungan Hidup, banyak kasus pembuangan limbah B3 dari luar negeri yang masuk ke perairan Indonesia. Untuk itu, Indonesia sangat berkepentingan terhadap pertemuan kali ini. Apalagi pemerintah Indonesia telah meratifikasi hasil Konvensi Basel melalui Keppres No 61/1993.

Rachmat menegaskan komitmen Indonesia terhadap persoalan limbah sangat serius. Melalui COP-9 yang berlangsung 23-27 Juni, Indonesia akan memelopori dalam menekan dan mewajibkan setiap negara untuk menghormati kebijakan negara-negara yang melarang impor limbah.

Indonesia melalui diplomasi akan mengimbau setiap negara penghasil limbah B3 untuk meminimalkan ekspor limbah B3. "Indonesia secara tegas melarang ekspor limbah B3 bila negara penerima tidak berkapasitas mengolah limbah B3 secara benar," tegasnya.

Keseriusan Indonesia terhadap pengolahan limbah terlihat dari keberhasilan mengembalikan 25 ton kondom bekas dan 6.000 ton susu kedelai yang terkontaminasi oleh virus berbahaya ke negara asalnya.

Diakui Rachmat, tahun lalu Indonesia telah menghasilkan 10 juta ton limbah. Dalam pengolahan limbah, Indonesia telah bekerja sama dengan beberapa negara yang memiliki pengolahan limbah B3.

Dalam catatan Kementerian Lingkungan Hidup, Indonesia telah berhasil mengolah 1.872 ton limbah, bekerja sama dengan negara lain. **(OL/H-3)**

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP